

## **STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ISL INDUSTRIAL STANDARDIZATION LAW JEPANG TERHADAP PRODUK KAYU LAPIS**

**Michael Salomo Dama<sup>1</sup>**  
**Nim. 1102045089**

### ***Abstract***

*Indonesia as the one of the producing countries of various types of processed timber which produce wood such as sawn timber, plywood and other wood products, and pulp for paper making. Indonesia continues to develop and produce non-oil export commodities and one of the non-oil export destination countries in this case to plywood products is Japan. Focused to Strategy by the Government of Indonesia in improving the quality of plywood and export volume of plywood to Japan. The research method used in preparing this thesis is descriptive analysis. Techniques of collecting data using literature review, using secondary data types. Data analysis technique used is qualitative analysis. The results showed that the Indonesian government in an effort to improve the quality of plywood and increase export volume is through two ways, namely the Intensive Silvification System is a system that is applied to maintain the forest so as to produce good quality wood products through reforestation and repair activities the technique of cutting trees, and the establishment of BPB is an agency that is tasked to assist Indonesian exporters to market their plywood products to be able to enter in the Japanese market and able to compete with timber exporter countries which is also potential in the international market*

***Keywords:*** *Indonesia-Japan, Plywood, Industrial Standardization law*

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil berbagai jenis kayu olahan dimana kayu yang dihasilkan antara lain kayu gergajian, kayu lapis dan hasil kayu lainnya, serta pulp untuk pembuatan kertas. Indonesia terus berupaya berkembang dan menghasilkan komoditi ekspor non migas tersebut dan salah satu negara tujuan ekspor non migas dalam hal ini terhadap produk kayu lapis adalah negara Jepang.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mika\_dama06@Aol.com.

Sejak tahun 1980 Indonesia telah membangun kerjasama bersama pemerintah Jepang dalam kegiatan ekspor kayu lapis, dimana kerjasama ini didukung dengan adanya kebijakan pemerintah Indonesia di bidang industri kehutanan lebih mengutamakan industri pengolahan kayu lapis dibandingkan kayu gergajian sehingga membuat industri kayu lapis berkembang lebih pesat dari industri kayu gergajian.

Pada saat kunjungan PM Jepang ke Indonesia, 19 – 21 Agustus 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shnzo Abe telah menandatangani dokumen kesepakatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, yakni *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Melalui kesepakatan IJEPA ini, Indonesia diharapkan dapat memperoleh manfaat antara lain dari meningkatnya akses untuk berbagai produk ekspornya di pasar Jepang. Hal ini juga akan memberikan dorongan bagi peningkatan investasi Jepang di Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) pilar pokok dalam persetujuan di dalam EPA *Economic Partnership Agreement* yaitu. Pertama: Kerja sama peningkatan kapasitas industri menjadi tumpuan harapan, Kedua: fasilitasi perdagangan dan investasi, Ketiga: liberalisasi yang menghapus sebagian besar tarif bea masuk ke kedua negara. Dengan demikian, kerja sama untuk peningkatan kapasitas industri dan ekonomi menjadi sangat penting sehingga diharapkan dengan kerja sama ini, Indonesia mendapatkan masukan-masukan dalam rangka program *capacity building*. Program ini sangat diperlukan karena akses masuk ke pasar Jepang lebih ketat oleh hambatan nontarif, terutama tuntutan standar kualifikasi produk yang tinggi. Jepang selalu menjadi pasar yang sangat penting bagi eksportir kayu. di karenakan pemakaian kayu di Jepang sangat besar.

Berdasarkan data Asosiasi Manufaktur Kayu Lapis Jepang, volume ekspor kayu lapis dari Indonesia ke Jepang tercatat mencapai 1.072.000 m<sup>3</sup> pada 2008, 1.180.030 m<sup>3</sup> pada 2009, 931.961 m<sup>3</sup> pada 2010, menjadi 1.087.848 m<sup>3</sup> pada 2011 dan 1.041.022 m<sup>3</sup> pada 2012. Hingga pada akhirnya volume ekspor pada Januari - Agustus 2013 mencapai 787.586 m<sup>3</sup> atau turun sebanyak 17,21%, disisi lain Indonesia bersama Malaysia merupakan pengeksportir utama pasar dunia untuk kayu lapis keras tropik *tropical hardwood plywood* selama bertahun-tahun. Ekspor kedua negara memiliki pangsa terbesar *dominant players* di dunia untuk jenis kayu lapis tersebut, secara total jika diperhitungkan jenis kayu lapis kayu lunak *softwood plywood*, pangsa kedua negara pada tahun 2000 adalah 47 %. Oleh karena itu untuk komoditas kayu lapis tropik, Indonesia dan Malaysia merupakan pesaing *competitor* untuk segmen pasar tersebut.

Hambatan-hambatan semakin lama semakin banyak dan semakin mempersulit ekspor Indonesia. Disisi lain terjadi pula perubahan perilaku konsumen seperti Jepang dalam melakukan pembelian, menjadikan hambatan dan tantangan yang semakin besar bagi pengembangan ekspor komoditi agribisnis Indonesia. Oleh karenanya perlu diupayakan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja pemasaran ekspor kita.

Jepang memberlakukan sistem hambatan non tarif yaitu sebuah hambatan untuk mengimpor dalam bentuk selain hambatan dalam bentuk tarif, di antaranya adalah peraturan-peraturan yang berlaku di Jepang yang berhubungan dengan produk kehutanan, pertanian, dan perikanan. Hambatan non tarif diberlakukan karena pemerintah Jepang senantiasa melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar termasuk mutu barang, sehingga diperlukan pemberlakuan serangkaian peraturan yang mengacu pada kepentingan nasional. Salah satu dari bentuk Proteksi itu ialah sistem ISL *Industrial Standardization Law* atau hukum standardisasi industri.

ISL dianggap cukup memberatkan eksportir Indonesia di karenakan kualitas kayu yang di inginkan oleh Jepang melalui sistem ISL adalah kualitas *Custom Grades* yaitu kualitas terbaik yang dipilih berdasarkan keindahan warna dan uratnya. Contohnya adalah *Decorative-faced tripleks 3mm : Teak plywood, Ramin plywood, Sungkai plywood, Rose plywood, Red Oak plywood, Melamin plywood*. Jepang mengurangi permintaan kayu lapis dalam kelas *Good grades* yaitu kayu lapis yang mutunya kurang dari custom, cukup layak untuk *finishing natural melamic* atau pelapisan menggunakan zat melamin, *Sound & Utilities grades* kayu lapis yang memiliki mutu rendah biasanya digunakan untuk pekerjaan struktur, atau dapat dilapis oleh *finishing duco* atau cat semprot, *Backing grades* kayu lapis mutu paling rendah yang dimanfaatkan untuk pekerjaan struktur yang tidak terlihat. Sementara dalam pemenuhan permintaan ekspor sebelum ISL diberlakukan permintaan produk kayu lapis mencakup hingga ke kelas *Good grades dan sound & utilities grades*.

Kualitas produk industri non-migas Indonesia dinilai masih belum memenuhi standar impor non migas ke Jepang, dikarenakan ekspor non migas Indonesia ke Jepang kebanyakan bukan produk manufaktur yang berkualitas tinggi, sistem pengolahan produk yang belum memenuhi standar dan juga produk berteknologi rendah bahkan sebagian besar juga merupakan produk industri kehutanan dan pertanian.

Dengan karakteristik pasar Jepang yang khas, pemerintah Jepang memberlakukan serangkaian paraturan yang mengacu pada kepentingan nasional, hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi Indonesia selaku negara yang mengekspor kayu lapis ke Jepang, dikarenakan ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Jepang telah menyulitkan eksportir Indonesia untuk masuk ke pasar Jepang oleh sebab itu pemerintah Jepang tidak seharusnya memberikan standar kualitas yang tinggi untuk produk kayu lapis, namun pada kenyataannya Jepang tetap memberlakukan standar kualitas yang tinggi

### **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

#### ***Teori Liberalisme Ekonomi***

Teori liberalisme ekonomi hadir akibat terfokusnya permasalahan pengaturan ekonomi yang hanya terpusat dan mendominasi dalam negara Eropa antara abad keenambelas dan ketujuhbelas, yang dilakukan oleh kaum merkantilisme dengan teori dan kebijakan men-subordinatkan ekonomi pada politik. Ekonomi liberal merupakan serangkaian prinsip dalam mengorganisasi dan mengatur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu.

Ekonomi liberal didasarkan pada pemikiran bahwa jika pasar ekonomi dibiarkan sendiri, maka pasar akan berjalan secara spontan berdasarkan pada mekanisme atau hukumnya sendiri. Hukum ini dianggap melekat dalam proses produksi ekonomi dan perdagangan.

Sistem ini mencakup kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, dasar dari setiap aktivitas ekonomi tetap pada ekonomi pasar dan menjunjung tinggi hak kepemilikan pribadi. Meskipun ekonomi liberalisme dapat mendukung peraturan pemerintah, sistem ini cenderung menentang intervensi pemerintah di pasar bebas dan persaingan. Namun sistem ini dapat menerima intervensi pemerintah dalam rangka menghapus monopoli yang dilakukan oleh pihak swasta, karena hal tersebut dianggap dapat membatasi kebebasan individu dalam membuat keputusan.

Konsep yang ditawarkan oleh kaum liberal bisa diprediksikan bahwa negara yang memperoleh keuntungan melalui spesialisasi dan kesejahteraan global akan meningkat. Berdasarkan kasus penerapan hambatan non tarif oleh pemerintah Jepang terhadap barang ekspor Indonesia dapat dilihat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pasar tersebut tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan, mengenai efisiensi dan keuntungan bersama, yang biasanya sering disebut kegagalan pasar. Oleh karena itu peraturan politik dirasa perlu untuk memperbaiki dan mencegah kegagalan pasar.

Sebagian kaum ekonomi liberal lainnya menghendaki dan mendukung ruang lingkup yang lebih luas bagi politik untuk turut serta dalam urusan pasar. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus segera menentukan kebijakan akan strategi seperti apa yang akan di gunakan untuk menghadapi hambatan non tarif tersebut Indonesia perlu melakukan sebuah upaya agar barang eksportnya memiliki kualitas yang dapat bersaing dan terus berinovasi di pangsa internasional, dan kebutuhan akan barang dan jasa melalui ekspor dan impor dapat di penuhi dan saling menguntungkan sebagaimana pasar merupakan wilayah khusus bagi masyarakat yang berjalan sesuai menurut hukum ekonominya sendiri. Karena pada hakekatnya, perekonomian wilayah kerjasama untuk sebuah keuntungan timbal balik baik antar individu, maupun antar negara.

### ***Proteksionisme***

Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi masuknya komoditi-komoditi dari luar negeri. Proteksionisme bisa terwujud dalam berbagai bentuk. Bentuk utama proteksionisme adalah pembatasan impor melalui pemberlakuan tarif, kuota, atau sanksi dagang. Selain itu, terdapat pula kebijakan-kebijakan proteksionisme yang disebut dengan hambatan non tarif (*non-tariff barriers*), seperti pemberlakuan ketentuan anti-dumping, standar keamanan (*safety standard*) produk, pemberian insentif atau subsidi atas kegiatan produksi maupun distribusi, dan lain-lain.

Proteksionisme non tarif ini terbentuk dari adanya kebijakan perdagangan internasional yang dijalankan suatu negara, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, serta arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan proteksionisme dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Akan tetapi dalam praktek perdagangan internasional kebanyakan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan kebijakan lainnya yang lebih rumit, yaitu Kebijakan proteksionisme non tarif.

Hal ini dilakukan negara tersebut untuk menyembunyikan motif proteksi atau sekedar mengecoh negara lainnya. Salah satu contoh proteksionisme non tarif ini dapat berupa regulasi produk atau berupa standardisasi produk salah satu contohnya adalah kebijakan ISL *industrial standardization law* oleh pemerintah Jepang kebijakan ini di ambil oleh pemerintah Jepang sebagai bentuk proteksi terhadap barang yang masuk ke dalam pasar Jepang sebagai akibat dari berkurangnya biaya pajak atau tarif barang yang masuk seperti yang di tetapkan pada IJEPA

Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak negara yang memberlakukan kebijakan proteksionisme non tarif walaupun beberapa ahli beranggapan bahwa kebijakan proteksionisme non tarif dapat menjadi penghalang untuk tercapainya keterbukaan dalam perdagangan internasional. Proteksionisme non tarif yang di berlakukan oleh negara Jepang terhadap ekspor Komoditas kayu lapis (*plywood*) Indonesia terlihat bahwa hal ini sangat cukup menyulitkan eksportir Indonesia diketahui bahwa kualitas produk Industri non-migas Indonesia mayoritas bukan produk manufaktur yang berkualitas tinggi, sistem pengolahan produk yang tidak memenuhi standar kualitas tinggi dan juga produk berteknologi rendah bahkan sebagian besar juga merupakan produk industri kehutanan dan pertanian dimana disamping itu juga Jepang ingin memperoleh produk yang mereka impor adalah produk yang memiliki standar kualitas terbaik yang di mana berdasarkan hal ini di khawatirkan akan berdampak pada terjadinya kegagalan pasar akibat adanya kebijakan Proteksionisme tersebut.

#### ***Konsep Strategi Bisnis Internasional Industrial Orientasi Ekspor***

Suatu negara atau suatu perusahaan pasti melakukan transaksi bisnis internasional dalam bentuk perdagangan internasional yang umumnya memiliki pertimbangan dimana pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan ekonomis, politis ataupun sosial budaya. Bisnis internasional memang tidak dapat dihindari karena tidak ada satu negara pun yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan negaranya dari barang-barang atau produk yang dihasilkan oleh negara itu sendiri. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyebaran yang tidak merata dari sumber daya baik dari sumber daya alam modal maupun sumber daya manusia.

Tidak meratanya sumber daya mengakibatkan adanya keunggulan dari suatu negara tertentu yang memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara lain, disejumlah negara berbagai karakteristi seperti ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, stabilitas politis, risiko lingkungan, kondisi operasi, dan infrastuktur, berdampak atas ketersediaan sumber daya untuk sebuah negara atau pasar tertentu dan juga cara

masuknya. Pasar kecil seringkali paling baik dilayani melalui pengeksporan atau pemberian lisensi, demikian pula, negara yang mungkin menghendaki pembatasan ekspor sumber daya ke negara-negara dengan tingkat risiko yang tinggi melalui perjanjian pemberian lisensi atau usaha dengan mitra dagang. Karakteristik produk, sifat permintaan, hambatan perdagangan, dan sasaran ekspansi juga mempengaruhi keputusan untuk memasuki pasar internasional.

Tujuan dari adanya strategi bisnis internasional ini adalah memperoleh tingkat hasil imbalan yang tinggi disamping mempertahankan tingkat komitmen sumber daya. Negara yang mengikuti strategi ini memilih target pasar yang mudah tersedia dan dapat meminimalkan risiko investasinya. Metode masuk pasarnya lebih sering dengan melalui ekspor atau pemberian lisensi. Keberhasilan strategi ini sangatlah tergantung pada pilihan agen, distributor, atau *licensees*. Namun terkadang regulasi pemerintah membatasi cara masuk yang terbuka bagi investor dari negara lain, karena pasar dunia berangsur-angsur saling tergantung dan terintegrasi serta banyak pemerintah telah mencabut atau mengurangi restriksi kepemilikan. Regulasi kontrak dengan para distributor dan organisasi lainnya, teristimewa yang berkaitan dengan perjanjian atau terminasi kontrak.

Hambatan perdagangan, seperti tarif, kuota, pabean, atau regulasi produk, juga mempengaruhi keputusan cara masuk. Hambatan perdagangan langsung yang membatasi impor barang-barang asing, seperti tarif dan kuota, mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan produksi atau perakitan lokal. Hambatan-hambatan perdagangan tidak langsung, seperti regulasi produk, regulasi perdagangan, standarisasi produk, dan preferensi kepada pemasok lokal juga mempunyai implikasi atas cara masuk dan keputusan operasi negara pengekspor.

Berdasarkan konsep strategi bisnis internasional industri orientasi ekspor dengan jelas dapat kita ketahui bahwa strategi merupakan suatu teknik yang dilakukan suatu individu atau kelompok demi mendapatkan kemenangan atau hal yang di inginkan, dalam hal ini eksportir Indonesia di haruskan untuk memproduksi atau memasarkan barang dengan kualitas yang lebih baik, agar mampu bersaing dan tetap mampu mempertahankan penetrasi pasarnya di pasar Jepang yang menetapkan sistem standardisasi industri sebagai standar utamanya pasca pemberlakuan pengurangan sistem hambatan tarif yang di atur pada perjanjian IJEPA, sehingga hidup perusahaan ataupun negara tidak terlalu tergantung pada suatu barang atau suatu pasar yang sangat sempit, dan produk yang di ekspor dalam hal ini kayu lapis (plywood) Indonesia dapat bertahan di pasar Jepang dalam pangsa pasarnya terhadap barang impor yang masuk ke dalam negaranya

### **Metodologi Penelitian**

Untuk menjelaskan apa strategi Indonesia dalam menghadapi ISL Jepang terhadap produk kayu lapis, penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis, dimana penulis menjelaskan dan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau permasalahan yang terjadi (adanya ISL Jepang) dan kemudian menganalisis mengapa permasalahan tersebut terjadi dan korelasinya. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang digunakan untuk menafsirkan dan menggambarkan persoalan

berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur. Data yang telah dianalisis kemudian digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dan penjelasan.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Gambaran Umum Kerja Sama Indonesia – Jepang.***

Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia yang diperhitungkan dalam menentukan strategi politik, keamanan maupun ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Posisi strategis Jepang tersebut selanjutnya telah mendorong Indonesia untuk menempatkan Jepang sebagai salah satu mitra penting dalam mewujudkan kepentingan nasional melalui berbagai kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Jepang memberikan komitmen dan dukungan terbaiknya kepada Indonesia dalam ikut menjaga dan memelihara keutuhan integritas teritorial dan kesatuan wilayah negara RI.

Hubungan diplomatik negara Indonesia dan Jepang dimulai pada bulan Januari tahun 1958, didasarkan pada perjanjian Perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang. Sejak saat itu hubungan bilateral antara kedua negara berlangsung baik dan terus berkembang tanpa mengalami hambatan. Eratnya hubungan bilateral kedua negara tersebut juga tercermin dalam berbagai persetujuan yang ditandatangani maupun pertukaran nota oleh kedua pemerintah, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi kerjasama di berbagai bidang.

Persetujuan Indonesia dan Jepang tersebut antara lain meliputi Pertama, “*Treaty of Amity and Commerce*” yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1961 di Tokyo. Kedua, “Perjanjian Hubungan Udara” yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 1962 di Tokyo. Ketiga, “Kerjasama di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 1981 di Jakarta. Keempat, “Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda” yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1982 di Tokyo.

Sejak tahun 1966 sampai sekarang antara pemerintah Indonesia dan Jepang telah dilakukan sekitar 200 pertukaran nota yang menyangkut kerjasama di bidang perikanan pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan dan bantuan keuangan Jepang. Tingginya intensitas kunjungan timbal balik di antara pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara juga semakin mempererat kerjasama kedua negara, sejak Indonesia dilanda krisis dan mengalami bencana tsunami, PM Jepang Junichiro Koizumi telah berkunjung empat kali ke Indonesia. Kunjungan terakhir Presiden Yudhoyono dilakukan pada bulan Nopember 2006, yang kemudian dibalas oleh kunjungan PM Shnzo Abe pada bulan Agustus 2007. Kunjungan timbal balik pada tingkat Menteri khususnya Menteri Luar Negeri, Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, para pejabat tinggi, politisi dan cendekiawan dari berbagai bidang disiplin serta seniman juga berlangsung dengan intensif.

Jepang memiliki kepentingan agar kerjasama dengan Indonesia dapat dilanjutkan dalam berbagai forum internasional dalam bentuk dukungan timbal balik, baik kepada posisi negara maupun kepada calon negara masing-masing, di sejumlah

organisasi regional dan internasional, termasuk pada sidang Komisi HAM PBB dan Sidang Sub-Komisi PDPM PBB.

Peningkatan hubungan kerja sama terjadi antara pemerintah Indonesia dan Jepang, hal ini diyakini akan menjadi alat utama untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara, dan juga dalam upaya mengali kemungkinan-kemungkinan baru untuk meningkatkan hubungan kedua negara secara konkrit.

Jepang merupakan mitra dagang utama Indonesia yang berada di urutan pertama sebagai negara tujuan ekspor dan sebagai sumber impor dengan total nilai perdagangan, Produk-produk ekspor Indonesia antara lain: minyak dan gas bumi serta produk non-migas seperti kayu lapis, mesin-mesin listrik, nikel, hasil perikanan, karet alam, kertas dan produk kertas, tekstil dan produk tekstil, furniture, kopi, cokelat, teh dan lainnya. Sedangkan produk impor utama dari Jepang ke Indonesia di antaranya adalah barang modal yang berkaitan dengan kegiatan investasi dan kebutuhan industri dalam negeri seperti mesin-mesin, perlengkapan elektronik, suku cadang kendaraan, besi baja, plastik, bahan kimia, dan produk metal.

Sejak tahun 1980 Indonesia telah membangun kerjasama bersama pemerintah Jepang dalam hal ini kegiatan ekspor kayu lapis, dimana kerjasama ini didukung dengan adanya kebijakan pemerintah Indonesia di bidang industri kehutanan lebih mengutamakan industri pengolahan kayu lapis dibandingkan kayu gergajian sehingga membuat industri kayu lapis berkembang lebih pesat dari industri kayu gergajian. Jepang selalu menjadi pasar yang sangat penting bagi eksportir kayu di karenakan pemakaian kayu di Jepang besar yakni penggunaan utamanya adalah sebagai bahan bangunan, berdasarkan data Asosiasi Manufaktur Kayu Lapis Jepang, volume ekspor kayu lapis dari Indonesia ke Jepang tercatat mencapai 1.072.000 m<sup>3</sup> pada 2008, 1.180.030 m<sup>3</sup> pada 2009, 931.961 m<sup>3</sup> pada 2010, menjadi 1.087.848 m<sup>3</sup> pada 2011 dan 1.041.022 m<sup>3</sup> pada 2012 hingga pada akhirnya volume ekspor turun pada periode 2013 yaitu mencapai 787. 586 m<sup>3</sup> ([www.Japanecconomy.com](http://www.Japanecconomy.com) di akses tanggal 13 februari 2018).

Volume Ekspor Kayu Lapis Indonesia Periode 2008-2013

Tahun	Volume Ekspor
2008	1.072.000 m <sup>3</sup>
2009	1.180.030 m <sup>3</sup>
2010	931.961 m <sup>3</sup>
2011	1.087.848 m <sup>3</sup>
2012	1.041.022 m <sup>3</sup>
2013	787.586 m <sup>3</sup>

Sumber: Badan Asosiasi Manufaktur Jepang Periode 2008-2013



Hal ini dapat menunjukkan bahwa komoditi kayu lapis Indonesia sangat dibutuhkan oleh pemerintah Jepang untuk mendukung pembangunan di Jepang. Untuk menanggapi hal ini pemerintah Indonesia terus berupaya mendukung industri pengolahan kayu agar dapat berkembang dan menghasilkan komoditi ekspor. Keinginan dan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terbukti dari dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1967 yang menjadikan industri pengolahan kayu sebagai penopang perekonomian negara. Sejak dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1967, peran Indonesia berubah drastis dalam bisnis kehutanan, terutama kayu lapis dunia. Komoditi kayu lapis merupakan yang terbesar dalam meningkatkan penerimaan negara, karena produksi dan eksportnya meningkat dengan pesat. Sebelum periode krisis, kayu lapis dan kayu olahan lainnya selalu menjadi motor ekspor non migas, karena nilai eksportnya selalu meningkat setiap tahun.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan larangan ekspor kayu bulat pada periode 1985 sampai 1997 yang disusul oleh kebijakan larangan kembali melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhut No. 1132 / Kpts – II / 2001 dan Menperindag No. 292 / MPP / Kep /1 0/ 2001 yaitu menciptakan nilai tambah pada produk kayu lapis melalui larangan ekspor kayu bulat (Deni Iswanto.2013.Faktor Faktor yang mempengaruhi ekspor kayu lapis Indonesia ke Jepang. Padang . Jurnal Ekonomi Pembangunan) Beberapa kebijakan pemerintah itu telah mendorong perkembangan industri kayu dan produk kayu lapis. Pada tahun 1989 keluar peraturan mengenai kenaikan pajak ekspor kayu gergajian sehingga mulai tahun 1990 ekspor kayu gergajian turun sekali tetapi ekspor kayu lapis terus meningkat dengan dan menjadi salah satu komoditi ekspor unggulan dalam sektor kehutanan.

Industri kayu lapis Indonesia menghadapi berbagai kendala yang menghambat perkembangannya, diantaranya adalah kesulitan pasokan bahan baku yang disebabkan oleh maraknya *illegal logging* yang terjadi di Indonesia. Produk kayu dalam negeri digunakan oleh negara kompetitor untuk memproduksi kayu lapis dengan harga lebih murah, sehingga menyebabkan produksi kayu lapis Indonesia terus mengalami penurunan. Penurunan produksi kayu lapis ini berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, penurunan produksi kayu lapis berakibat pada penurunan ekspor kayu lapis, sehingga mengurangi cadangan devisa negara.

#### ***Pasar Kayu Lapis Indonesia***

Industri kayu lapis merupakan industri yang memberikan kontribusi terbesar sebagai penyumbang devisa negara dibandingkan industri produk kehutanan lainnya, negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kayu lapis sebagian besar berada di kawasan Asia, Amerika dan Kawasan Uni Eropa.

Negara Tujuan Ekspor Kayu Indonesia

Negara	2008	2009	2010	2011	2012
Jepang	539,1	441.2	594.0	819.1	738.5
Korea Selatan	82,8	71.0	69.4	84.4	80.1
Tiongkok	80.3	48.3	97.7	208.0	313.8
Yordania	36.1	37.2	37.2	36.6	40.4
UEA	96.7	45.7	70.4	41.7	36.3
Australia	28.0	16.8	30.1	32.6	33.6
Amerika	86.0	78.1	117.5	106.8	129.3

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah oleh KEMENDAG

Peningkatan ekspor ke negara-negara di Asia terutama Jepang dibandingkan ke Amerika dan negara Eropa lainnya adalah terkait karena jenis kayu lapis dari kayu lapis keras (*hardwood plywood*) ke jenis yang lebih murah yaitu kayu lapis lunak (*softwood plywood*). Berdasarkan bahan bakunya, kayu lapis memang dibedakan menjadi dua yaitu kayu lapis jenis *hardwood* dan *softwood*. Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis banyak ditumbuhi kayu - kayu yang cocok untuk diproduksi menjadi kayu lapis keras. Adapun untuk bahan baku kayu lapis lunak banyak terdapat di negara yang beriklim subtropis seperti di Eropa, Amerika Utara dan Rusia. Alasan yang kedua terkait dengan semakin meningkatnya kepedulian sebagian besar negara-negara maju terhadap masalah lingkungan yaitu dengan adanya penerapan *ecolabelling*.

Pemikiran mengenai pentingnya sertifikasi *ecolabell* semakin meningkat sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekspor kayu lapis Indonesia. Hal lain yang juga menjadi penyebab mulai menurunnya kinerja ekspor kayu lapis pada tahun 1997 yaitu krisis ekonomi yang melanda sebagian besar negara-negara di Asia sehingga mempengaruhi kondisi keuangan negara-negara tersebut dalam membiayai proyek-proyek pembangunan. Imbasnya, permintaan impor kayu lapis dari Indonesia menurun.

Industri kayu lapis nasional merupakan salah satu industri yang selalu mendapat prioritas dalam pengembangannya dibandingkan dengan industri pengolahan kayu lainnya. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan dan peraturan yang sangat mendukung pengembangan industri kayu lapis nasional mulai dari kegiatan produksi hingga pemasaran. Peran serta pemerintah dalam mengatur produksi kayu lapis nasional sangat menonjol melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan adapun untuk kegiatan yang terkait dengan perdagangan dan pemasaran kayu lapis, Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) yang memegang peranan penting.

Asosiasi panel kayu Indonesia diposisikan sebagai wadah kerjasama antar pengusaha dalam industri kayu lapis di Indonesia. Asosiasi ini dibentuk sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi perkembangan produksi kayu lapis yang

semakin meningkat dengan pesat sehingga memerlukan pengelolaan yang baik terutama dalam perdagangannya agar melimpahnya jumlah produksi tersebut tidak sampai membuat industri ini justru terpuruk. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum penawaran, peningkatan jumlah penawaran suatu barang atau jasa akan membuat harga yang terjadi semakin menurun. Oleh karena itu, APKINDO berupaya mengatur perdagangan kayu lapis Indonesia terutama untuk pasar luar negeri.

Keterlibatan APKINDO dalam mengatur perdagangan kayu lapis sangat besar dirasakan terutama untuk pemasaran kayu lapis di luar negeri. APKINDO menentukan kuota ekspor untuk masing-masing produsen kayu lapis domestik sesuai dengan pembagian wilayah pemasarannya atau dengan kata lain APKINDO menentukan siapa pembeli kayu lapis Indonesia di luar negeri. Penetapan harga ekspor kayu lapis pun dilakukan oleh APKINDO dengan tujuan agar menjamin bahwa harga yang dibayarkan kepada produsen kayu lapis di Indonesia mendapatkan harga yang sesuai dengan kondisi wilayah pemasarannya. APKINDO melakukan berbagai upaya untuk membuat agar kayu lapis Indonesia bisa mempunyai posisi yang bagus di pasar perdagangan internasional diantaranya dengan membentuk tujuh Badan Pemasaran Bersama (BPB).

BPB dibentuk berdasarkan pertimbangan geografis dibagi atas beberapa wilayah yaitu BPB untuk wilayah Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Cina, Jepang dan negara-negara yang merupakan negara tujuan ekspor yang baru seperti Australia dan Taiwan. Pembagian tiap wilayah ini didasari alasan karena tiap wilayah mempunyai kondisi dan karakteristik pasar yang berbeda-beda seperti kondisi ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kayu lapis serta pasar kayu lapis di wilayah tersebut sehingga akan mempengaruhi kebijakan pemasaran kayu lapis yang akan diterapkan di wilayah tersebut seperti penetapan kuota dan harga ekspor kayu lapis pemasaran kayu lapis ke luar negeri terkesan begitu mendapat berbagai peraturan lain halnya dengan pemasaran kayu lapis di dalam negeri. Produsen kayu lapis lebih mendapatkan kebebasan untuk menjual kayu lapis dengan diperbolehkannya mereka menjual kepada eksportir lain yang berminat mengimpor kayu lapis namun tetap dalam pengawasan APKINDO.

#### ***Ekspor Kayu Lapis Indonesia ke Jepang***

Jepang merupakan mitra dagang utama Indonesia yang berada di urutan pertama sebagai negara tujuan ekspor. Selama beberapa tahun industri kayu lapis Indonesia mendominasi pasar kayu lapis tropik. Industri kayu lapis Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagai negara pengeksportir kayu lapis terbesar didunia.

Jepang selalu menjadi pasar yang penting bagi eksportir kayu di karenakan pemakaian kayu di Jepang sangat besar dan permintaan kebutuhan kayu lapis di Jepang juga sangat tinggi namun permintaan akan kayu lapis Indonesia mulai terancam semenjak adanya sistem pengawasan mutu produk dengan standar yang tinggi di berlakukan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2008.

Kayu Lapis sendiri merupakan salah satu produk yang paling banyak diimpor Jepang dari Indonesia setelah bahan bakar mineral, ores, dan bagian mesin dan peralatan listrik. negara yang paling banyak mengeksport produk kayu ke Jepang adalah Indonesia, Rusia, Cina, Jerman, Malaysia dan Amerika. Dalam memasarkan produk kayu lapis ke Jepang Indonesia masih merasakan adanya hambatan yang menjadi tantangan bagi Indonesia bagaimana mempertahankan kayu lapis dalam mengeksport produk tersebut untuk memasuki pasar Jepang, hal ini diperkuat yakni dengan berkurangnya hambatan tarif dalam perdagangan ekspor tidak selalu berarti akan semakin mudahnya ekspor produk agribisnis Indonesia ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan negara-negara pengimpor seperti Jepang, China, dan beberapa negara di benua Eropa menggunakan hambatan non-tarif yang tidak jarang digunakan untuk meningkatkan *bargaining position* mereka dalam pasar internasional.

Hambatan-hambatan, semakin lama semakin banyak dan semakin mempersulit ekspor Indonesia. Disisi lain terjadi pula perubahan perilaku konsumen dalam hal ini Jepang dalam melakukan pembelian, menjadikan hambatan dan tantangan yang semakin besar bagi pengembangan ekspor komoditi agribisnis Indonesia.

#### ***Kebijakan Non Tarif Jepang***

Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Akan tetapi, dalam praktek perdagangan internasional saat ini, kebanyakan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan kebijakan lainnya yang lebih rumit, yaitu kebijakan *Non tariff Barrier*.

Hal ini dilakukan negara tersebut untuk menyembunyikan motif proteksi atau sekedar mengecoh negara lainnya. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak negara yang memberlakukan kebijakan nontarif barrier walaupun beberapa ahli beranggapan bahwa kebijakan nontarif barrier dapat menjadi penghalang untuk tercapainya keterbukaan dalam perdagangan internasional, salah satu contoh dari bentuk proteksionisme ini adalah memberlakukan sistem standardisasi kualitas produk atau jasa cara ini dilakukan dengan membuat standard kualitas khusus produk atau jasa yang akan masuk ke suatu negara tertentu harus memenuhi standar kualitas negara tersebut.

Pembatasan ini sama sekali tidak terkait dengan aspek-aspek finansial, dalam hal ini Jepang memberlakukan sistem berhubungan dengan produk kehutanan, pertanian, dan perikanan. Hal ini diberlakukan karena pemerintah Jepang senantiasa melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar termasuk mutu barang, sehingga diperlukan pemberlakuan serangkaian peraturan yang mengacu pada kepentingan nasional. Salah satu dari bentuk Proteksi itu ialah sistem ISL *Industrial Standardization Law* atau hukum standardisasi industri yaitu sebuah

sistem yang bertujuan untuk mempromosikan standarisasi industri dengan menetapkan dan mensosialisasikan standar industri yang dianggap tepat dan dianggap mampu untuk memperbaiki kualitas produk pertambangan dan industri yang akan masuk ke dalam suatu negara dalam hal ini Jepang. Proses standarisasi dikoordinasikan oleh Jepang Komite Standar Industri dan dipublikasikan melalui Asosiasi Standar Jepang. Di era Meiji, perusahaan swasta bertanggung jawab untuk membuat standar meskipun pemerintah Jepang tidak memiliki standar dan dokumen spesifikasi untuk tujuan pengadaan untuk artikel tertentu. Ini diringkas untuk membentuk standar resmi (JES lama) pada tahun 1921.

Organisasi Jepang *Standards Association* didirikan setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada 1945. Para Industri Jepang Komite Standar peraturan yang diundangkan pada tahun 1946, standar Jepang (JES baru) dibentuk. Hukum Standardisasi Industri disahkan pada 1949, yang membentuk landasan hukum bagi Standar Industri Jepang (JIS). Hukum Standardisasi Industri direvisi pada tahun 2004 lalu pada tahun 1 Oktober 2005 mengalami perubahan pada label sertifikasi dan label baru JIS telah diterapkan pada sertifikasi ulang, namun penggunaan label sertifikasi lama masih diizinkan selama masa transisi tiga tahun (sampai 30 September 2008), dan setiap produsen mendapatkan sertifikasi baru atau memperbaharui bawah persetujuan otoritas telah mampu untuk menggunakan merek JIS baru. Oleh karena itu semua JIS-bersertifikat produk Jepang telah memiliki JIS tanda baru sejak 1 Oktober 2008.

Untuk produk kehutanan pemerintah memiliki lembaga sertifikasi khusus yaitu *Japan Agricultural Standards (JAS)*. JAS dibentuk khusus untuk memproteksi produk makanan, minuman bukan alkohol, dan hasil perhutanan. Produsen dapat menyantumkan lambang JAS ini setelah melalui penilaian oleh produsen, distributor, atau importir yang terdaftar sebagai organisasi pihak ketiga. Karena itu, produk dengan lambang JAS tercantum di labelnya mendapat kepercayaan konsumen akan mutu dan kualitas produk, sehingga lebih di inginkan dibandingkan dengan produk tanpa label.

Jepang telah menetapkan persyaratan *Japan Agriculture Standard (JAS)* atas kayu dan produk kayu impor yang akan digunakan untuk bahan bangunan negaranya. Persyaratan yang diberlakukan itu antara lain menyangkut kualitas produk, mulai bahan kimia yang terkandung dalam produk kayu misalnya kayu lapis, ukuran hingga sistem pengeleman. Lembaga Sertifikasi Akreditasi harus memperbarui akreditasi secara berkala, dan harus diawasi dan diperintahkan untuk mematuhi menteri yang kompeten jika diperlukan. Kepada organisasi bersertifikasi, selain pelaksanaan pengawasan pemeliharaan sertifikasi oleh Badan Sertifikasi Akreditasi, menteri dapat melakukan audit dan memerintahkan organisasi yang disertifikasi untuk menghapus atau menghapus tanda JIS dari produk atau menghentikan penjualan produk tersebut, namun, dengan pencairan sertifikasi hanya bisa dilakukan oleh badan sertifikasi akreditasi.

Semua tindakan yang mungkin dilakukan termasuk layanan informasi positif kepada konsumen dan pengguna, pengumpulan dan penanganan keluhan yang sesuai, dan uji coba sampling dari pasar produk termasuk produk penataan diri.

Skema JIS periode pengukuran transisi telah ditetapkan selama tiga tahun 1 Oktober 2005– 30 September 2008, secara garis besar kebijakan JIS yaitu terlampir produk pertambangan dan industri termasuk obat-obatan, bahan kimia pertanian, pupuk kimia benang sutra dan produk pertanian atau kehutanan yang ditentukan dalam undang-undang tentang standardisasi dan pelabelan tepat untuk produk pertanian dan kehutanan, sistem komoditas terdahulu ditentukan setelah revisi undang-undang tersebut pada tahun 2004. Di Indonesia sendiri dari sekitar 40 unit industri *plywood*, baru dua yang sudah mengantongi sertifikat JAS. Untuk mendapatkan JAS tidak mudah. karena semua infrastrukturnya dikalibrasi.

### ***Dampak Kebijakan Jepang Terhadap Produk Kayu Lapis Indonesia***

Pemberlakuan sistem hambatan non-tarif oleh Jepang yakni sebuah sistem yang senantiasa melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar termasuk mutu barang, sehingga diperlukan pemberlakuan serangkaian peraturan yang mengacu pada kepentingan nasional. Salah satu dari bentuk proteksi itu ialah sistem ISL yaitu *Industrial Standardization Law* atau hukum standardisasi industri sebuah sistem yang bertujuan untuk mempromosikan standardisasi industri dengan menetapkan dan mensosialisasikan standar industri yang di anggap tepat dan di anggap mampu untuk memperbaiki kualitas produk.

Sampai saat ini masih banyak negara yang memberlakukan kebijakan proteksionisme non tarif walaupun beberapa ahli beranggapan bahwa kebijakan proteksionisme non tarif dapat menjadi penghalang untuk tercapainya keterbukaan dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini kebijakan non tarif yang di berlakukan oleh negara Jepang terhadap ekspor komoditas kayu lapis *plywood* Indonesia terlihat bahwa hal ini sangat cukup menyulitkan eksportir Indonesia dikarenakan Pemerintah Jepang menaikkan pajak pertambahan nilai untuk impor kayu lapis indonesia dari 5% menjadi 8% disisi lain kualitas produk Industri non-migas Indonesia mayoritas bukan produk manufaktur yang berkualitas tinggi, sistem pengolahan produk yang tidak memadai dan juga produk berteknologi rendah bahkan sebagian besar juga merupakan produk industri kehutanan dan pertanian dimana disamping itu juga.

Jepang ingin memperoleh produk yang mereka impor adalah produk yang memiliki standar kualitas terbaik yang di mana berdasarkan hal ini di khawatirkan akan berdampak pada terjadinya kegagalan pasar akibat adanya kebijakan tersebut. Hal ini mulai terbukti dengan terjadinya penurunan ekspor kayu lapis Indonesia ke pasar Jepang dimana pada awal periode 2001 permintaan pasar Jepang akan produk kayu lapis menyentuh 1.6 juta ton dan berdampak pada penurunan yang signifikan hingga 529.800 ton pada 2009 (Badan Pusat Statistik diolah oleh lembaga research Kata Data) dan itu merupakan titik terendah dari volume ekspor kayu lapis Indonesia.

### ***Pembentukan Badan Pemasaran Bersama (BPB) Melalui APKINDO.***

APKINDO melakukan berbagai upaya untuk membuat agar kayu lapis Indonesia bisa mempunyai posisi yang bagus di pasar perdagangan internasional diantaranya dengan membentuk tujuh Badan Pemasaran Bersama (BPB). Lembaga yang merupakan perpanjangan tangan APKINDO ini diperkuat kedudukannya dengan

Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.1198/KP/84 dan mempunyai peran untuk mengontrol keadaan pasar kayu lapis baik di dalam maupun di luar negeri.

BPB dibentuk berdasarkan pertimbangan geografis sedangkan dua lainnya dibentuk untuk mengontrol pasar yang terkait dengan pemasaran produk baru dan pemasaran untuk pasar di dalam negeri. BPB yang dibentuk berdasarkan pertimbangan geografis dibagi atas beberapa wilayah yaitu BPB untuk wilayah Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Cina, Jepang dan negara-negara yang merupakan negara tujuan ekspor yang baru seperti Australia dan Taiwan.

Pembagian tiap wilayah didasari alasan karena tiap wilayah mempunyai kondisi dan karakteristik pasar yang berbeda-beda seperti kondisi ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kayu lapis serta pasar kayu lapis di wilayah tersebut sehingga akan mempengaruhi kebijakan pemasaran kayu lapis yang akan diterapkan di wilayah tersebut seperti penetapan kuota dan harga ekspor kayu lapis. APKINDO beranggapan dengan pengontrolan dan pengaturan yang dilakukannya dapat membuat posisi kayu lapis Indonesia di pasar luar negeri senantiasa berada dalam kondisi yang bagus dan stabil.

Badan Pengawas Produksi (BPP) dibentuk bukan untuk mengatur harga dan kuota perdagangan kayu lapis sehingga produsen kayu lapis bisa tetap memasarkan hasil produksinya. Untuk mengeksportir kayu lapis, produsen mempunyai sub divisi ekspor atau merangkap sebagai eksportir kemudian dikirim ke importir yang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan eksportir. Dalam implementasinya APKINDO dan BPB dalam perindustrian kayu lapis Indonesia sangat membantu produsen kayu lapis Indonesia dalam memasarkan produk kehutanan Indonesia ini, kemudahan yang di tawarkan oleh APKINDO maupun BPB dinilai mampu membantu meaikkan taraf ekspor kayu lapis Indonesia keberbagai negara dalam hal ini Jepang.

Jepang yang merupakan salah satu negara pengimpor kayu lapis Indonesia memiliki minat yang cukup tinggi terhadap produk kayu olahan Indonesia namun di sisi lain karakteristik pasar Jepang yang khas menjadi tantangan berat bagi produsen kayu lapis Indonesia. APKINDO dan BPB membantu produsen kayu lapis Indonesia dengan melalui serangkaian kebijakan bersama pemerintah Indonesia membuka akses pasar yang tidak tersentral kepada satu pasar utama di Jepang sehingga produk kayu lapis bisa tetap masuk kedalam pasar kecil Jepang yang luas dengan penawaran standar kualitas produk yang beragam.

### ***Penerapan Silvikultur Intensif***

Silvikultur intensif merupakan seni dalam memproduksi dan memelihara hutan. silvikultur intensif, merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kayu lapis Indonesia melalui pemberdayaan optimal sumberdaya hutan yang tersedia. sistem silvikultur intensif ini sendiri meliputi perbaikan hutan atau reboisasi melalui penanaman kembali, keterampilan menebang, sosialisasi masyarakat agar tidak merusak kawasan hutan, penundaan penebangan pohon usia dini serta penyediaan sarana pendukung lainnya untuk keperluan pemeliharaan kawasan hutan Dalam implementasinya, sistem silvikultur

intensif berupaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan hasil hutan Indonesia dengan melakukan Reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang sudah rusak akibat aktivitas penebangan baik oleh masyarakat setempat atau bahkan oleh industri pengolahan kayu, kegiatan ini juga di unggulkan untuk menciptakan kembali produktivitas hutan melalui penggantian pohon yang sudah rusak dan mati, serta tidak produktif lagi. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada sumber daya alam dalam faktor kondisi yang mengalami hambatan karena rusaknya kawasan hutan dan kurangnya jumlah populasi pohon yang berkualitas .

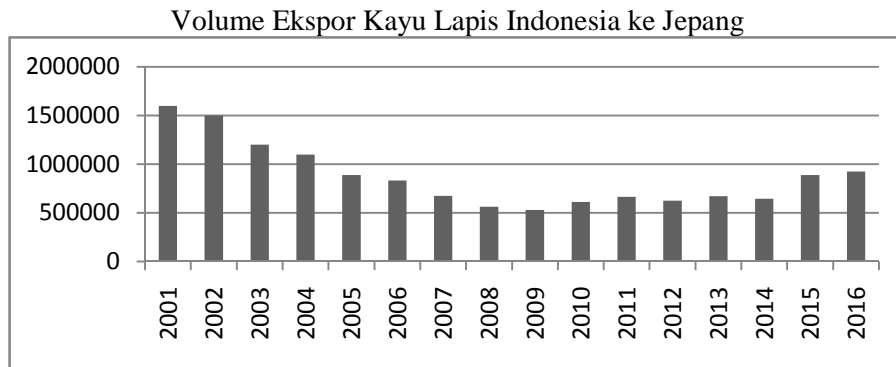
Keterampilan menebang untuk mengurangi potensi penebangan dini pada pohon. Pohon akan memiliki nilai produktivitas yang sangat rendah apabila ditebang pada usia yang terlalu dini, dengan umur dibawah 5 tahun. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada sumber daya alam yang akan menurunkan kualitas kayu lapis pada saat proses pengolahan hingga pada saat memasuki pasar baik domestik maupun internasional.

Sosialisasi masyarakat yaitu bentuk dari suatu upaya peningkatan produktivitas hasil hutan melalui sosialisasi pelestarian hutan serta penerapan budidaya penanaman pohon yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang tersedia dan dapat diperbaharui untuk memenuhi permintaan pasar serta mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada sumber daya alam yang mengalami hambatan dalam memproduksi hasil hutan untuk dapat memenuhi produksi dan melebihi negara penghasil kayu lapis lainnya.

Selain berupaya untuk perbaikan produktivitas hasil hutan dalam hal ini kayu lapis, sistem silvikultur intensif juga memberikan pemahaman kepada para produsen hasil hutan untuk tetap dapat melaksanakan pelestarian hutan dan tetap mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Produsen tersebut masing-masing memiliki tanggung jawab dalam pelestarian hutan. Peran dari sistem silvikultur intensif ini juga sebagian besar dapat membantu dalam menghadapi permasalahan kurangnya mutu serta kualitas produk dari hasil hutan Indonesia dan dari penerapan sistem ini kedepannya kualitas produk Indonesia dapat menembus pasar internasional khususnya pasar Jepang.

Dalam aplikasinya tercapainya keberhasilan yang sesuai dengan konsep strategi bisnis internasional industrial orientasi ekspor, yang dialami oleh pemerintah Indonesia tidak lepas dari keberhasilan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, berikut pemaparan keberhasilan sesuai dengan konsep strategi bisnis internasional industrial orientasi ekspor yaitu Permintaan Pasar Jepang Untuk memenuhi permintaan pasar berupa kayu lapis dengan kualitas, pemerintah Indonesia menggunakan strategi sistem silvikasi produk. Selain meningkatnya kualitas produksi kayu lapis Indonesia, keberhasilan yang juga dicapai dalam indikator ini adalah peningkatan ekspor kayu lapis Indonesia ke Jepang. Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:





Sumber: Badan Pusat Statistik diolah oleh lembaga research Kata Data

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2001-2009, Indonesia mengalami penurunan ekspor Kayu Lapis ke Jepang yaitu dengan nilai ekspor 1.600.000 m<sup>3</sup> menjadi 529.800 m<sup>3</sup>. Namun melalui strategi untuk peningkatan produktifitas kualitas kayu lapis serta menerapkan kebijakan dalam negeri, nilai ekspor kayu lapis Indonesia mampu meningkat seperti pada tahun 2016 yang mencapai nilai ekspor hingga 924.400 m<sup>3</sup>.

Adapun keberhasilan lainnya dapat dilihat dari Kondisi Internal Indonesia yaitu Melalui pelaksanaan strategi Silvikultur Intensif oleh pemerintah Indonesia, beberapa keberhasilan dalam pengolahan sumber daya alam dalam hal ini kayu bulat sebagai bahan baku utama pembuatan kayu lapis di beberapa pulau di Indonesia mulai menunjukkan hasil positif .

#### Volume Produksi Kayu di beberapa pulau Indonesia

No	Daerah	Volume Produksi
1	Pulau Sumatra	21,41 Juta m <sup>3</sup>
2	Pulau Kalimantan	11,11 Juta m <sup>3</sup>
3	Pulau Jawa	4,18 Juta m <sup>3</sup>
4	Pulau Maluku dan Papua	1,56 Juta m <sup>3</sup>
5	Pulau Sulawesi	0,32 Juta m <sup>3</sup>
6	Bali dan Nusa Tenggara	0,03 Juta m <sup>3</sup>

Sumber: *Statistic of forestry Production*. Diolah oleh penulis.

Apabila dilihat menurut pulau asal tempat kayu bulat dihasilkan, dari 38,61 juta m<sup>3</sup> produksi kayu bulat Indonesia, sebesar 21,41 juta m<sup>3</sup> (55,46 persen) dihasilkan di Pulau Sumatera, sebesar 11,11 juta m<sup>3</sup> (28,78 persen) dihasilkan di Pulau Kalimantan, 4,18 juta m<sup>3</sup> (10,82 persen) dihasilkan di Pulau Jawa, 1,56 juta m<sup>3</sup> (4,04 persen) dihasilkan di Pulau Maluku dan Papua, 0,32 juta m<sup>3</sup> (0,82 persen) dihasilkan di Pulau Sulawesi, dan sisanya sebesar 0,03 juta m<sup>3</sup> (0,07 persen) dihasilkan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Berdasarkan data tersebut jumlah produksi kayu Indonesia akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun pasar internasional.

### **Kesimpulan**

Masalah ekspor kayu Lapis Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan non tarif Jepang atau ISL *Industrial Standardization Law* adalah akibat dari rendahnya kualitas kayu lapis Indonesia, memotivasi pemerintah Indonesia untuk membuat strategi ekspor berupa strategi internal yaitu kebijakan ekspor melalui APKINDO dan BPB serta sistem sulvikultur intensif. Dalam penelitian ini strategi tersebut dianalisis melalui konsep strategi bisnis internasional industrialisasi orientasi ekspor yang menekankan pada poin yaitu negara yang mengimplementasikan strategi bisnis internasional industrial orientasi ekspor ini memilih target pasar yang mudah tersedia dan dapat meminimalkan risiko investasinya dimana metode masuk pasarnya lebih sering dengan melalui ekspor atau pemberian lisensi.

Dalam upaya memperbaiki kualitas kayu lapis, pemerintah Indonesia membuat strategi internal yaitu melalui sistem silvikasi instens untuk perbaikan mutu kayu lapis dan meningkatkan produktivitas industri kehutanan dalam negeri. Sedangkan untuk menghadapi kebijakan non tarif pemerintah Indonesia mengaplikasikan kebijakan bersama BPB yang dibentuk oleh APKINDO untuk meningkatkan potensi pasar Indonesia agar produk kehutanan Indonesia dapat di pasarkan baik di dalam maupun di luar negeri, terlebih khusus untuk produk kayu lapis Indonesia menuju pasar Jepang

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Burchill,S and Linklater,A. (1996).*Theories of International Relations*. NewYork: ST Martin's Press.

Dunne,T, Kurki M, and Smith S.(2007 ).*International Relation Theories,Dicipline and Divercity*. New York:Oxford University Press.

Jackson,R and Sorensen,G. (1999) . *Introduction to International Relation*. New York: Oxford University Press.

Sitepu, A.P .(2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

#### **Jurnal dan eBook**

Deni,.2013.Faktor Faktor yang mempengaruhi ekspor kayu lapis Indonesia ke Jepang. Padang. Jurnal Ekonomi Pembangunan, [www.files.eth.jh.isn/55690/Pdf](http://www.files.eth.jh.isn/55690/Pdf). Diakses pada 24 Februari 2018.

*Kajian Perkembangan Perekonomian Kayu Nasional*. Kementrian Kehutanan RI. 2012,<http://www.Kemhut.go.id/sites/default/files.pdf>. diakses pada 24 Februari 2018.

**Website**

APKINDO: . Industri-Bisnis.com. di

<http://industri.bisnis.com/read/20120205/99/62567/askindo-program-gerakan-nasional-kakao-tidak-efektif> diakses pada 23 Maret 2018.

Agribisnis, *Hambatan Non Tarif*, Agribisnis% 20% 20% 20HAMBATAN% 20NON% 20TARIFF.html, di akses 8 Januari 2015.

Bisnis, *Pengusaha Usul Bentuk Hambatan non Tarif*, di akses [http://id.effectivevmeasure.net/em\\_image](http://id.effectivevmeasure.net/em_image) " alt="" , Pada tanggal 8 Januari 2015.

*Full Report WTO* ,

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/Full-Report-WTO.pdf> pada tanggal 8 Januari 2015.

Gaby , Kartika 2012. “ Kerjasama Bilateral Indonesia - Jepang

<http://www.Kertikagaby.wordpress.com> di akses pada tanggal 16 februari 2018.

HabiAkhsan, [Http://KERJASAMA INDONESIA – JEPANG \\_ akhsanhabi.html.com](Http://KERJASAMA INDONESIA – JEPANG _ akhsanhabi.html.com) diakses pada tanggal 16 februari 2018

Indah Aritonang, Agribisnis, *Kebijakan Perdagangan Internasional Proteksionisme dan Tarif*. Html, di akses pada 19 mei 2015.

INOVASI NEWS PPI JEPANG. 2012. “Refleksi 50 Tahun Diplomasi Jepang-Indonesia <http://www.io.ppijepang.org>. di akses tanggal 9 februari 2018

*IOE, Ekspor Indonesia Bisa*. Harian bisnis News.. Di

[https://www.Harianbisnisnews.com/index.php?jdl=\\_Ekspor\\_Indonesia\\_bisa\\_&ke\\_bijakan\\_ekspor\\_Kayu\\_bulat=&newsandopinion&level3=&level4=INDONESIA&id=634551&polar=Y#.V7q5YvkrLIU](https://www.Harianbisnisnews.com/index.php?jdl=_Ekspor_Indonesia_bisa_&ke_bijakan_ekspor_Kayu_bulat=&newsandopinion&level3=&level4=INDONESIA&id=634551&polar=Y#.V7q5YvkrLIU) diakses pada 27 Maret 2018.

Kata Data , <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/volume-ekspor-kayu-lapis-indonesia-ke-jepang-2000-2014> di akses tanggal 13 februari 2018

Novianti Ana , *Ekspor Kayu Lapis ke Jepang Melonjak Jelang Penaikan PPN* ,

[, pada tanggal 8 Januari 2015](https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=Ea4Ze1aowb00ax)

PT Asia Agro Sejahtera diolah dari data FAOSTAT–Forestry [www. faostat.fao.org](http://www.faostat.fao.org). di akses tanggal 5 januari 2018.

TempatKumpulAhli,ApaItu

Liberalisme,[http://ad.adstars.co.id/adserv/3.0/1353/4916480/0/170/ADTECH;loc=300;grp=\[group\]](http://ad.adstars.co.id/adserv/3.0/1353/4916480/0/170/ADTECH;loc=300;grp=[group])" border="0" width="300" height="250" , pada tanggal 8 Januari 2015.

Yulianingsih Yuni, *Ekspor kayu lapis ke jepang naik 17,21%*, <http://stats.wordpress.com/b.gif?v=noscript>"style="height:0px;width:0px;overflow:hidden" alt="", Pada Tanggal 8 Januari 2015.